

Peran Komunikasi *Hexahelix* Dalam Konstruksi Sosial Mitigasi Covid-19 Pada Masyarakat Badui Luar

Made Wilantara^{1*}, Misnan²

¹Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

²Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta, Indonesia

*mdwilantara@gmail.com

Artikel

Submitted: 23-04-2023

Reviewed: 09-05-2023

Accepted: 22-06-2023

Published: 29-06-2023

DOI:

10.32509/wacana.v22i1.2741



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Volume : 22

No. : 1

Bulan : Juni

Tahun : 2023

Halaman : 142-154

Abstract

The purpose of the study was to find out the social construction of the reality of the Badui community against zero percent COVID-19 transmission. The research approach is qualitative with a constructivist paradigm. The research method is descriptive with purposive data collection. The results showed that the Bureaucrats (Local Government Officials) carried out effective externalization-internalization communication management, namely instructions from the central government could be implemented maximally with effective coordination of meaning. Furthermore, the Customary Head carries out legitimacy-socialization communication management, which emphasizes that COVID-19 must be overcome by treating ancestral heritage and following government instructions in interacting. Next, Scholars (Badui Culture Observers) carry out institutionalization-objectivation communication management, namely that the community must obey the rules and customary culture and believe in the Almighty. As for the Volunteers, they carry out socialization communication management, namely providing input and warnings to the local community to maintain the health of their respective families. Other supports are health workers, through health communication and the communication nodes of the Badui community themselves as small circles at the family and community level (internalization).

Keywords: social construction, Badui, COVID-19, hexahelix

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengetahui konstruksi sosial realitas masyarakat Badui terhadap penularan COVID-19 nol persen. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode penelitian adalah deskriptif dengan pengumpulan data bersifat *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalangan Birokrat (aparatur pemerintah setempat) melakukan manajemen komunikasi eksternalisasi – internalisasi efektif, yakni instruksi dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan maksimal disertai koordinasi makna efektif. Selanjutnya Kepala Adat melakukan manajemen komunikasi legitimasi – sosialisasi, yakni menegaskan bahwa COVID-19 harus diatasi dengan pengobatan warisan nenek moyang dan mengikuti petunjuk pemerintah dalam berinteraksi. Berikutnya Cendekiawan (Pemerhati Budaya Badui) melakukan manajemen komunikasi institusionalisasi – objektivasi, yakni masyarakat harus taat aturan dan budaya adat serta yakin terhadap Yang Maha Kuasa. Adapun relawan melakukan manajemen komunikasi sosialisasi, yakni memberikan masukan dan peringatan kepada masyarakat setempat agar tetap menjaga kesehatan keluarga masing-masing. Dukungan lain adalah tenaga kesehatan, melalui komunikasi kesehatan dan simpul-simpul komunikasi masyarakat Badui sendiri sebagai lingkaran-lingkaran kecil tingkat keluarga dan kelompok masyarakat (internalisasi).

Kata kunci: konstruksi sosial, Badui, COVID-19, *hexahelix*

PENDAHULUAN

Dalam konteks komunikasi, penanggulangan pandemi COVID-19, melibatkan semua elemen masyarakat. Pada mulanya pola linier berupa tindakan represif instruksional dilakukan, namun laju penularan COVID-19 ternyata masih tinggi. Oleh karena itu, dalam tahapan-tahapan selanjutnya pemerintah menyadari bahwa pola-pola komunikasi segitiga, segiempat dan seterusnya sangat dibutuhkan, terlebih lagi mulai maraknya penolakan atas justifikasi covid atas pasien. Hal ini juga terkait dengan wilayah Indonesia yang secara demografis sulit digunakan sistem *lockdown* (Widuhung, 2021).

Kala itu, Indonesia menduduki tingkat keempat sebagai negara terpadat yang diprediksi memiliki penderitaan yang memakan waktu lama terpapar pandemi COVID-19. Dengan bentuk negara yang luas dan kepadatan penduduk yang tersebar dalam beberapa pulau besar, Negara Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mengatasi COVID-19. Meskipun terdapat tantangan tersendiri, daerah-daerah terpencil di Indonesia biasanya memiliki kearifan lokal yang memiliki cara tersendiri dalam mitigasi bencana (Susiani et al., 2021). Hal tersebut dibuktikan oleh (CMS et al., 2021) bahwa kearifan lokal pada masyarakat tradisional di Indonesia merupakan alternatif dalam mencegah bencana ataupun dalam penanganan pasca bencana, sehingga kearifan lokal memiliki peran penting dalam memitigasi bencana. Kebermanfaatan kearifan lokal dalam mitigasi bencana, disebut (Fitri Al Qalbi, 2021) sebagai “pendekatan kultural”. Salah satu masyarakat tradisional yang dimaksud antara lain adalah masyarakat Badui.

Masyarakat Badui merupakan sebuah masyarakat adat yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Bagi mereka sendiri dan masyarakat sekitar lebih senang disebut Urang Kanekes (orang Kanekes) (Hidayati et al., 2017). Desa ini memiliki dua kelompok besar yakni Badui Luar dan Badui Dalam. Di Badui Dalam terdapat 3 kampung yakni Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Sedangkan di Badui Luar terdiri dari 55 kampung (Mulyana & Sambas, 2021). Suku ini masih sangat memegang teguh pikukuh (aturan) adat istiadat yang menjadi falsafah hidup masyarakatnya. Sebagian pikukuh tersebut yakni *lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung* (Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung). *Pikukuh* ini memiliki makna bahwa masyarakat Badui tidak diperbolehkan mengubah sesuatu yang telah ada di dalamnya dan masyarakat harus menerima apa adanya (Miharja et al., 2021).

Dengan memegang teguh *pikukuh* tersebut masyarakat Badui mampu hidup bersahaja dengan menjaga kelestarian alamnya. Di dalamnya dapat ditemukan tiga hal utama dalam keseharian, yakni kesederhanaan, bersahabat dengan alam dan spirit kemandirian, sehingga cukup beralasan bahwa masyarakat Badui dapat bertahan dari gangguan kehidupan modern (Basuki, 2019). Sebenarnya tidak serta merta seluruh masyarakat Badui memegang teguh *pikukuh* tersebut. Mereka yang masih benar-benar memegang teguh *pikukuh* adalah masyarakat Badui Dalam. Berbeda dengan masyarakat Badui Luar yang telah terkontaminasi kehidupan modern. Hal ini pula yang membedakan antara Badui Luar dan Badui dalam (Miharja et al., 2021) (Mulyana & Sambas, 2021).

Meski terdapat perbedaan, Badui Luar dan Badui Dalam masih sama-sama berada dalam satu pimpinan tertinggi yakni *Puun* yang dapat mengatur semua aspek kehidupan, karena dipercaya memiliki hubungan dengan leluhurnya (*karuhun*). Selain itu, masyarakat Badui juga patuh pada penanggung jawab sistem pemerintahan, yakni *jaro pamarentah*, sehingga masyarakat Badui memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu struktur pemerintahan adat dan struktur nasional. Lebih jelasnya, *Puun* berurusan dengan hal yang gaib, sedangkan *jaro pamarentah* berurusan dengan persoalan duniawi (Asy'ari et al., 2013).

Pada masa pandemi, ternyata masyarakat Badui dapat terhindar dari paparan COVID-19. Dikonfirmasi oleh Kabid Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak bahwa sampai puncak pandemi belum ada warga Badui yang terpapar COVID-19 (Ahmad, 2015). Agaknya hal ini dipengaruhi oleh peran kearifan lokal Badui yang dipegang teguh oleh segenap anggota masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, mengungkapkan bahwa kearifan tradisional yang berkembang pada kehidupan sosial (Badui) merupakan solusi konstruktif jangka panjang dalam permasalahan kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan pandangan hidup,

pengetahuan, kemampuan, dan kebiasaan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Hal ini dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Dengan adanya pedoman tersebut maka sebuah komunitas dapat memiliki ketahanan di wilayah komunitas tersebut berada. Dengan memiliki kearifan lokal dalam menjalankan kehidupan, tidak mengherankan bahwa masyarakat Badui dapat tetap menjalankan kehidupannya dengan normal meskipun sedang sama-sama terancam oleh penyebaran virus COVID-19 (Wibisono et al., 2013).

Sejauh ini, kasus positif COVID-19 di lingkungan masyarakat Badui yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak Banten masih nol persen. Padahal kabupaten tersebut sedang berstatus zona merah. Menurut Kepala Puskesmas Cisimeut Lebak, masyarakat Badui sangat disiplin mematuhi peraturan yang diberikan oleh tetua adat, termasuk penerapan *prokes* (*merdeka.com*, Kamis, 1 Juli 2021). Di tengah pandemi, masyarakat adat Badui lebih banyak melakukan aktivitas di ladang masing-masing, sehingga tidak bertemu dan melakukan kontak erat dengan orang dari luar. Sementara itu kawasan pemukiman diperketat dengan protokol kesehatan termasuk melarang wisatawan membuang sampah sembarangan.

Sementara itu tetua adat *Kanekes Jaro Saija* mengatakan bahwa *prokes* memang tegas diterapkan di wilayahnya. Warga tidak diperbolehkan ke luar daerah dan warga Badui yang merantau diminta untuk pulang sementara. Sebelum sampai di kampung, mereka diminta memeriksakan diri ke puskesmas setempat serta meminum ramuan tradisional yang terbuat dari rempah adat. Selain itu, masyarakat Badui secara terbuka menyatakan siap divaksin. Tetua adat juga menghimbau agar masyarakat Badui tidak ke luar daerah, seperti Jakarta, Tangerang dan Bogor. Fenomena-fenomena faktual tersebutlah yang melatarbelakangi pemilihan topik penelitian ini. Melalui sudut pandang konstruktivis, konstruksi sosial masyarakat Badui tentang COVID-19, akan didapatkan makna-makna kultural yang cukup kontributif dalam membangun kesepahaman tentang penanggulangan COVID-19 dalam konteks kearifan lokal.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan, *pertama*, berjudul “Aplikasi Pedulilindungi Mitigasi Bencana COVID-19 di Indonesia”. Jurnal ini menganalisis model komunikasi bencana dalam aplikasi Pedulilindungi yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori komunikasi bencana (Putri & Hamzah, 2021). *Kedua*, “Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”. Jurnal ini mengkaji bagaimana pemerintah dan masyarakat merencanakan berbagai upaya pencegahan COVID-19 dengan menggunakan empat strategi, yaitu: promotif, preventif, kuratif dan jaring pengaman sosial. Jurnal ini menggunakan metode tinjauan literatur dan teori manajemen bencana (Wahidah et al., 2020). *Ketiga*, “**Konstruksi Realitas Sosial dan Makna Diri Penyintas COVID-19 di Jakarta**”. Pembahasan jurnal ini meneliti bagaimana penyintas COVID-19 di Jakarta membentuk realitas sosial dan makna diri mereka berdasarkan pengalaman komunikasi yang mereka hadapi selama dan setelah terinfeksi virus. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dan teori konstruksi realitas sosial (Wati & Hadi, 2021).

Dilihat dari sisi *research gap*, jurnal pertama berfokus pada model komunikasi bencana dalam aplikasi Pedulilindungi yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia. Jurnal ini tidak membahas tentang komunikasi *hexahelix* yang melibatkan enam elemen penting dalam mitigasi COVID-19, yaitu pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, media, dan modal. Jurnal ini juga tidak membahas tentang konstruksi sosial mitigasi COVID-19 yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat Badui Luar. Jurnal kedua berfokus pada analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan COVID-19 dengan menggunakan empat strategi, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan jaring pengaman sosial.

Jurnal ini tidak membahas tentang komunikasi *hexahelix* yang melibatkan interaksi antara keenam elemen penting dalam mitigasi COVID-19. Jurnal ini juga tidak membahas tentang konstruksi sosial mitigasi COVID-19 yang mencerminkan kesadaran, pemahaman, sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat Badui Luar dalam menghadapi pandemi. Sedangkan jurnal ketiga berfokus pada konstruksi realitas sosial dan makna diri penyintas COVID-19 di Jakarta berdasarkan pengalaman komunikasi yang

mereka hadapi selama dan setelah terinfeksi virus. Jurnal ini tidak membahas tentang komunikasi *hexahelix* yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara keenam elemen penting dalam mitigasi COVID-19. Jurnal ini juga tidak membahas tentang konstruksi sosial mitigasi COVID-19 yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat Badui Luar yang memiliki karakteristik khusus dalam hal budaya, adat, dan kepercayaan.

Berdasarkan *research gap* tersebut, tujuan umum penelitian adalah untuk mengkaji peran komunikasi *hexahelix* dalam konstruksi sosial mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui Luar. Sedangkan tujuan khusus adalah: 1) mendeskripsikan karakteristik masyarakat Badui luar dalam hal budaya, adat dan kepercayaan yang berkaitan dengan mitigasi COVID-19. 2) Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi *hexahelix* dalam mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui luar. 3) Mendeskripsikan proses dan hasil komunikasi *hexahelix* dalam membentuk konstruksi sosial mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui luar. 4) Meninjau komunikasi efektif yang sudah terjadi, terutama dampak komunikasi *hexahelix* dalam mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui luar. 5) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan komunikasi *hexahelix* dalam mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui luar.

METODOLOGI

Paradigma yang mendasari asumsi dasar realitas, pengetahuan, nilai dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah paradigma interpretif konstruktivis. Paradigma ini beranggapan bahwa realitas bersifat subjektif dan bervariasi tergantung pada makna yang diberikan oleh individu atau kelompok. Pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi antara peneliti dan partisipan. Nilai-nilai peneliti juga mempengaruhi proses penelitian dan hasilnya. Tradisi ini merupakan pendekatan naturalistik yang mengamati fenomena dalam konteks alamiahnya. Hal ini tentu terkait dengan konsep eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang merupakan momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Masyarakat adalah produk manusia (*society as a human product*); masyarakat adalah kenyataan objektif (*man is an objective reality*); dan manusia adalah produk sosial (*man is a social product*). Jika dalam proses ini ada satu momen diabaikan maka mengakibatkan terjadinya *distorsi* (Dharma, 2018) (Dreher, 2016). Teori konstruksi sosial Bergerian melihatnya dari ketiga momen dialektik tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Metode ini digunakan karena mampu melihat sebuah fenomena dengan menggambarkan secara naratif dengan mengaitkan pada dampak dari peristiwa tersebut (Erickson, 1968 dalam Crump, 2020). Sedangkan jenis penelitian lapangan digunakan dengan meninjau penggunaan data yang menjadi sumber penelitian ini dihasilkan dari kasus aktual yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, data primer yang diperoleh langsung berupa wawancara, observasi, dokumen, rekaman audio atau video, foto atau artefak. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan data yang sudah diolah atau dianalisis oleh orang lain, berupa buku, jurnal, artikel, laporan, statistik, *database* atau teks media.

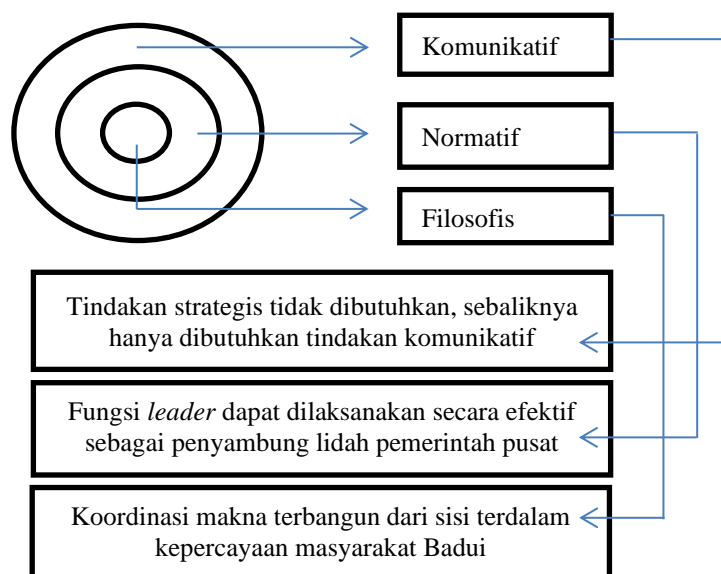
Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif atau non-partisipatif, studi dokumen, analisis isi, analisis wacana, analisis naratif, analisis visual. Teknik penentuan *key informan* menggunakan teknik *purposive*, yakni peneliti memilih partisipan yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini didasarkan pada pertimbangan rasional dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini juga disebut sebagai *sampling* bertujuan atau *sampling* berdasarkan maksud. Dengan demikian, teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer dihasilkan dengan cara observasi dan wawancara terstruktur kepada informan yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian (Fadli, 2021).

Selanjutnya teknik analisis data terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini juga melibatkan pengkodean data, kategorisasi data, tematisasi data, narasikan data, visualisasikan data atau triangulasikan data. Sementara itu, metode penentuan kesahihan data adalah triangulasi sumber atau metode, perpanjangan keikutsertaan atau pengamatan berkelanjutan (Yusanto, 2020).

HASIL PENELITIAN

Konstruksi Sosial Realitas oleh Birokrat (Aparat Pemerintah Setempat)

Birokrat melakukan manajemen komunikasi eksternalisasi – internalisasi efektif, yakni instruksi dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan maksimal disertai koordinasi makna efektif. Koordinasi makna yang dimaksud adalah kesepahaman antara birokrat, kepala adat, pemuka lingkungan dengan segenap masyarakat. Artinya, komunikasi kepemimpinan dapat berjalan secara efektif.



Gambar 1. Manajemen Komunikasi Birokrat
(Sumber: olahan peneliti, 2022)

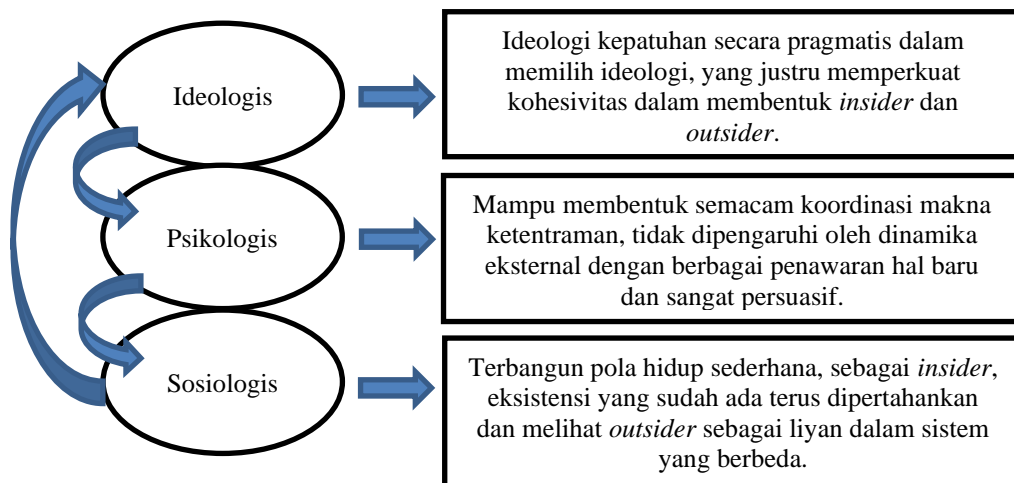
Dari Gambar 1 terlihat tahapan konstruksi realitas antara birokrat dan masyarakat terdapat perbedaan. Jika birokrat mengonstruksi realitas dari eksternalisasi, tetapi masyarakat justru mengawali konstruksi realitas dari internalisasi. Dapat dikatakan bahwa konstruksi realitas birokrat merupakan proses pembentukan masyarakat terhadap individu, sehingga memunculkan aksi, reaksi atau gerakan, sedangkan konstruksi realitas individu masyarakat merupakan proses pembentukan individu terhadap masyarakat. Dalam hal ini, faktor *leadership* menjadi pemeran sentral. *Leader* akan memosisikan diri dalam kepentingan-kepentingan. Kepentingan pemerintah pusat menjadi target yang harus difasilitasi, sebaliknya keinginan masyarakat juga harus diakomodasi.

Terlepas dari argumentasi tersebut, kemampuan koordinasi makna oleh birokrat telah mampu membuat seluruh komponen masyarakat Badui dari tingkat atas sampai terbawah memahami bahwa kepatuhan merupakan implementasi simbolik yang harus menjwai kehidupan sehari-hari terlebih lagi saat menghadapi pandemi, yang sesungguhnya menjadi ancaman siapa saja tidak peduli struktur dan pranata masyarakat manapun. Namun demikian, para birokrat menyadari bahwa efek kepatuhan ini dapat menjadi boomerang jika konsistensi citra birokrat tidak dapat terjaga. Kesan bahwa birokrat memanfaatkan kepatuhan warga tentu harus dihindari, citra birokrat harus terkonstruksi sebagai makna kepedulian terhadap sesama.

Dapat disimpulkan bahwa konstruksi realitas sosial oleh birokrat dapat dipahami dalam 3 ranah, yakni filosofis (menyentuh sisi budaya dan religiusitas masyarakat Badui), ranah normatif (tugas umum sebagai *leader*) dan tindakan komunikatif. Jika dibandingkan dengan konstruksi birokrat di tempat lain (di luar wilayah Badui), terdapat perbedaan signifikan, yakni, bukan tindakan komunikatif yang dilakukan, tetapi tindakan strategis, yakni bahasa-bahasa instruktif dan sanksi. Hal ini tidak terjadi pada wilayah Badui, karena antara Kepala Adat dan seluruh komponen masyarakat terbawah berada pada sistem kepatuhan yang terbangun dari sisi psikologis religiusitas. Dapatlah dijadikan generalisasi makna, bahwa dalam penanggulangan COVID-19, kepatuhan menjadi kunci sentral dalam mencegah penularan.

Konstruksi Sosial Realitas oleh Kepala Adat

Kepala Adat melakukan manajemen komunikasi legitimasi – sosialisasi, yakni menegaskan bahwa COVID-19 harus diatasi dengan pengobatan warisan nenek moyang dan mengikuti petunjuk pemerintah dalam berinteraksi. Pemangku adat yang dimaksud adalah para generasi tua atau yang dituakan, yang menduduki status sosial tertentu dan sangat sentral berperan dalam mempertahankan tradisi dan adat setempat, bahkan masih dijadikan referensi implementasi keagamaan lokal.



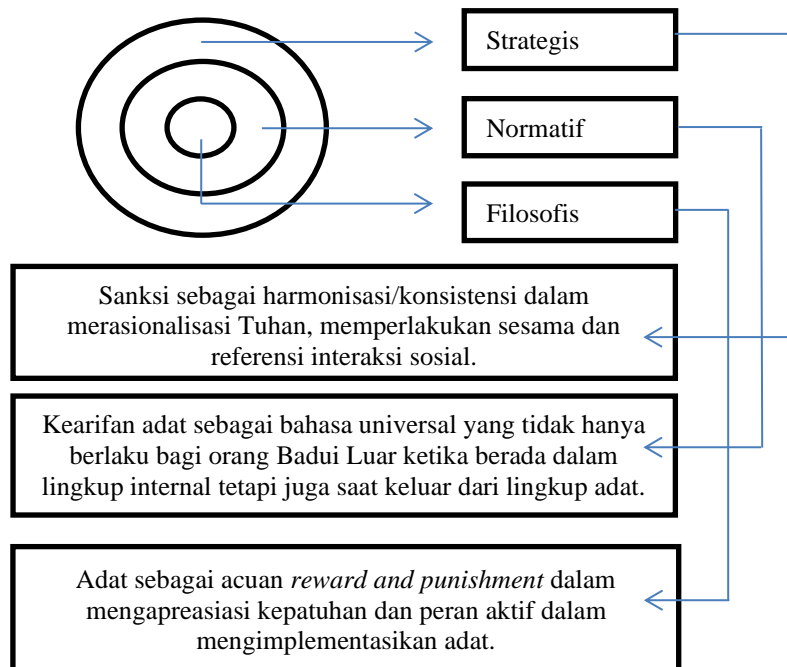
Gambar 2: Konstruksi Penerimaan Pesan Warga Badui (Sumber: Olahan Peneliti, 2022)

Dari Gambar 2 tampak bahwa dibandingkan dengan birokrat, konstruksi realitas yang dibangun oleh Kepala Adat justru bertolak belakang dengan birokrat. Legitimasi justru dapat diperankan oleh Kepala Adat dengan efektif. Hal ini tidak terlepas dari kultur masyarakat Badui yang lebih mematuhi instruksi Kepala Adat dibanding birokrat. Yang menjadi unsur positif adalah peran Kepala Adat yang relatif mudah berkoordinasi dengan birokrat, bahkan ini menjadi sebagian dari budaya komunikasi mereka.

Di sisi lain, jika konstruksi realitas birokrat melalui proses pembentukan masyarakat terhadap individu, tetapi Kepala Adat justru mampu membentuk konsep diri individual untuk bermasyarakat. Dalam konteks ini secara implisit dapat dilihat bahwa segenap strata masyarakat Badui mengkreasi pesan para Kepala Adat dalam 3 fungsi komunikasi, yakni fungsi ideologis, psikologis dan sosiologis. Dalam fungsi ideologis, warga Badui tidak memerlukan ideologi lain selain apa yang disampaikan oleh Kepala Adat. Secara psikologis, ideologi semacam ini memperkuat pola hidup kesederhaan sebagaimana diterapkan warga Badui Luar maupun Dalam.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa pola konstruksi realitas Kepala Adat dan Birokrat, secara filosofis, normatif dan komunikatif terdapat perbedaan. Kesamaan keduanya adalah pranata *leader*, sedangkan perbedaannya adalah *leadership* yang diterima sampai pada sisi ideologis (untuk Kepala

Adat). Perbedaan paling sentral adalah pada ranah komunikatif. Kepala Adat justru mempraktikkan tindakan strategis, yakni disertai sanksi-sanksi, yang tidak terjadi pada Birokrat. Hal ini tentu menjadikan pola konstruksi sosial yang unik dibanding wilayah-wilayah di luar Badui secara umum. Kepala Adat dapat menyampaikan instruksi strategis berupa resiko jika warga tidak mematuhi pesan yang disampaikan Kepala Adat, meskipun resiko yang disampaikan tidak tertulis atau eksplisit.

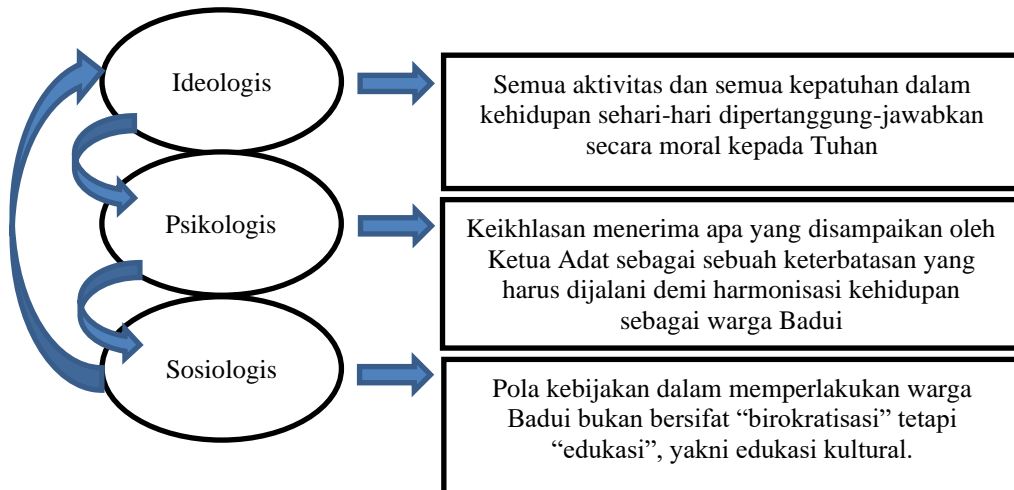


Gambar 3. Manajemen Komunikasi Kepala Adat
(Sumber: olahan peneliti, 2022)

Konstruksi Sosial Realitas oleh Cendekiawan (Pemerhati Budaya Badui)

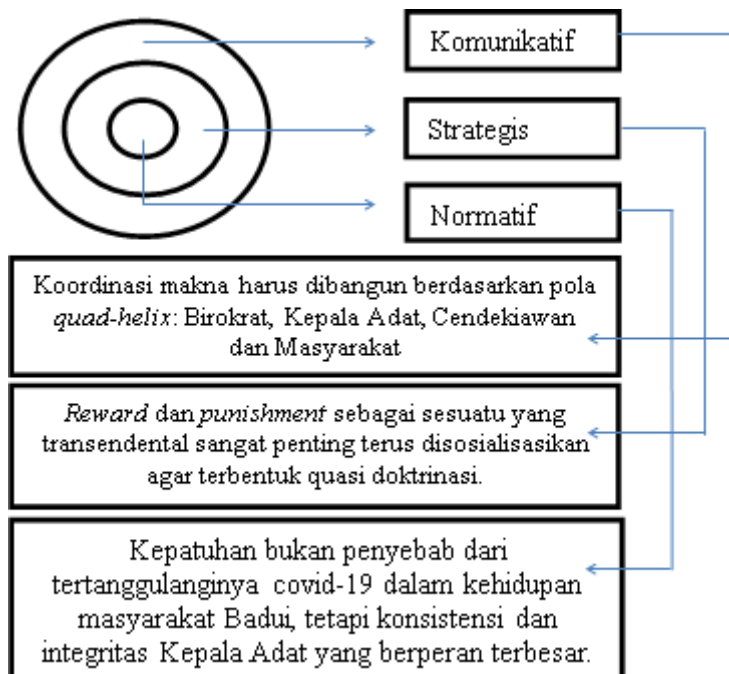
Berikutnya Cendekiawan (Pemerhati Budaya Badui) melakukan manajemen komunikasi institusionalisasi – objektivasi, yakni masyarakat harus taat aturan dan budaya adat serta yakin terhadap Yang Maha Kuasa. Konstruksi khas dari aktivis adalah keyakinan dan harapan mereka pada institusi Kepala Adat dibanding program-program pemerintah yang lebih mereka anggap sebagai langkah normatif saja. Bagi mereka, ancaman industri penularan COVID-19 di tanah Badui sebenarnya lebih mengawatirkan dibanding wilayah lain, akibat area yang terisolir. Oleh karena itu karakter konservatisme justru menjadi pilihan. Pola pranata adat yang masih dipatuhi menjadi kunci yang sama sekali harus dijaga, terutama di saat gawat darurat pandemi.

Bagi cendekiawan, berdasarkan referensi masyarakat di luar Badui, justru karena adatlah mereka tidak memenuhi protokol kesehatan. Akibat kepercayaan terhadap budaya setempat, maka COVID-19 banyak dianggap sebagai penyakit biasa, bahkan dalam diskursus Jawa terkenal melalui istilah *pageblug* (Hendro, 2020), suatu wabah yang sudah ada sejak dulu, yang justru dipercaya sebagai kejadian musiman belaka. Untungnya hal ini terjadi sebaliknya pada kasus warga Badui, justru mereka patuh dan taat kepada sanksi adat yang sesungguhnya sangat masif menghadapi tantangan kemajuan informasi.



Gambar 4: Konstruksi Penerimaan Pesan Warga Badui (Sumber: Olahan Peneliti, 2022)

Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa secara implisit konstruksi wawasan terhadap ancaman COVID-19 dilakukan melalui kreasi pesan institusionalisasi dilanjutkan objektivasi. Inti dari pesan institusionalisasi adalah himbauan cendekiawan terhadap Kepala Adat untuk terus mensosialisasikan sanksi adat dalam memotivasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan program penanggulangan dari pemerintah. Objektivasi yang dimaksud adalah eksistensi Tuhan sebagai pertanggungjawaban moral masyarakat Badui. Konstruksi pesan seperti ini mustahil dilakukan oleh Birokrasi. Meskipun pada akhirnya agak sulit membuat *blue print* sanksi adat, setidaknya himbauan para cendekiawan dapat memotivasi para Ketua Adat melakukan sosialisasi yang frekuensinya meningkat dari sebelumnya.



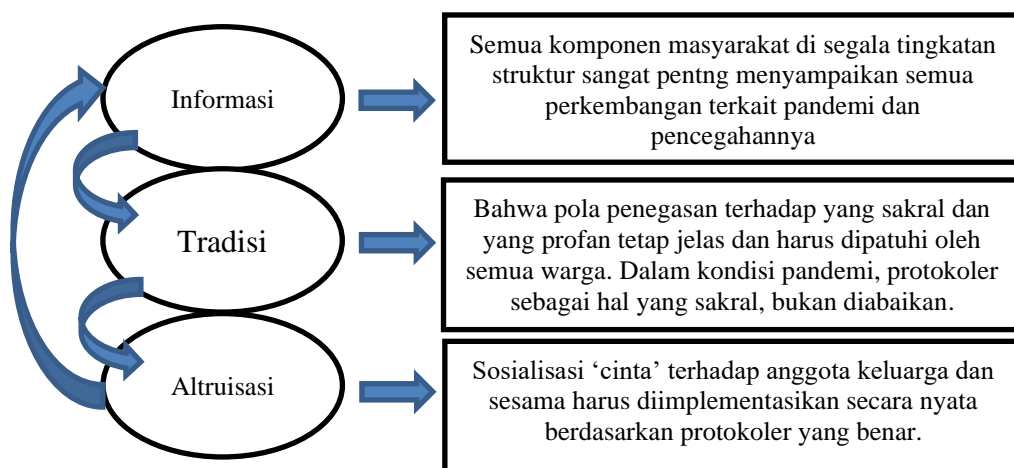
Gambar 5. Manajemen Komunikasi Cendekiawan (Sumber: olahan peneliti, 2022)

Adapun Gambar 5 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Birokrat dan Kepala Adat, konstruksi sosial Cendekiawan memang berbeda. Jika birokrat memiliki konstruksi pesan filosofis, normatif dan komunikatif, sedangkan Kepala Adat memiliki pola pengelolaan pesan yang filosofis, normatif dan strategis, cendekiawan justru memiliki pola normatif, strategis dan komunikatif. Cendekiawan sebagai praktisi komunikasi lebih banyak melakukan tindakan praktis dibanding praksis dan filosofis, karena bukan komunikator langsung yang secara langsung berhadapan dengan segmentasi komunikan.

Konstruksi Sosial Realitas oleh Relawan dan Pemuka Keluarga Badui Luar

Relawan dan pemuka keluarga yang dimaksud adalah informan *purposive* yang merupakan anggota masyarakat biasa, tetapi menjadi simpul komunikasi di lingkungannya. Dalam konteks penelitian ini, informan yang dimaksud melakukan manajemen komunikasi sosialisasi, yakni memberikan masukan dan peringatan kepada masyarakat setempat agar tetap menjaga kesehatan keluarga masing-masing. Dibandingkan kontruksi realitas yang terbangun oleh lembaga, birokrat dan pemangku adat, maka konstruksi realitas oleh pemuka masyarakat umum memiliki tahapan yang sederhana. Masyarakat umum sebagai strata terendah secara ekonomi, lebih banyak memiliki kesadaran harmonisasi atau stabilisasi dibanding kesadaran terhadap hal-hal yang bernada kritis. Meskipun pada pranata masyarakat modern, masyarakat semacam ini juga tidak selalu konstruktif, tetapi pada kasus kedaruratan seperti pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Jika tidak akan terjadi semacam ironi situasi, ketika pemerintah di satu sisi harus meredakan pandemi, di sisi lain tidak dihiraukan protokol yang dirancang. Demikian pula terdapat potensi dramatik ironi, ketika masyarakat tidak mematuhi protokol, maka anggota keluarga lain akan terancam, masyarakat luas lebih terancam, bahkan para tenaga medis juga terancam. Jika kenyataan ini terjadi, maka *chaos* tentu terjadi. Oleh karena itu dalam menerima prosedur protokoler, dalam situasi pandemi dibutuhkan kepatuhan, bukan sikap kritis layaknya kebijakan pemerintah lain yang dinilai ada unsur-unsur kepentingan.

Di antara masyarakat, masih banyak yang justru tidak mengenal apa yang dimaksud pandemi, meskipun mereka mengetahui adat dan tradisi khas Badui yang sudah secara turun-temurun, misalnya pandemi cacar, influenza, demam berdarah atau lainnya. Pemuka masyarakat Badui dapat menjelaskan hal ini secara interpersonal, termasuk bagaimana menghadapi penularan dengan pencegahan serta perlindungan di tingkat keluarga. Tidaklah mungkin secara detil hal ini dapat dilakukan oleh para cendekiawan, birokrat atau tokoh adat.



Gambar 6. Konstruksi Penerimaan Pesan Warga Badui
(Sumber: Olahan Peneliti, 2022)

Pada Gambar 6, diketahui bahwa dibandingkan cendekiawan, birokrat atau tokoh adat, pola penerimaan masyarakat terhadap pemuka masyarakat sebagai simpul komunikasi terdapat perbedaan. Hal ini diakibatkan oleh komunikasi interpersonal yang berlangsung dalam konteks budaya, bahasa dan kebiasaan yang lebih kental. Pola penerimaan yang dimaksud adalah informasi, tradisi dan altruisasi. Sebagai simpul komunikasi, informasi sangat penting disampaikan, tradisi protokoler harus menjadi pembiasaan baru dan altruisasi adalah gerakan peduli pada anggota keluarga, lingkungan dan masyarakat yang lebih luas (dijauhi sikap egois).

Dari 5 komponen pranata masyarakat Badui yang telah penulis bahas, tampak bahwa konsepsi komunikasi dalam kasus nol persen angka COVID-19 di wilayah Badui, secara dominan merupakan pemikiran komunikasi pihak birokrat dan kepala adat, walaupun terdapat dukungan yang sangat penting yakni dari kalangan petugas kesehatan. Peneliti berasumsi bahwa unsur sentral dari keduanya tetaplah pemerintah, karena pemerintah harus memiliki gagasan-gagasan strategis dalam mengomunikasikan perubahan dan dinamika eksternal secara efektif dengan Kepala Adat. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan. Oleh karena itu, konsepsi komunikasi oleh pemerintah merupakan problematika kompleks yang sangat penting dicermati. Sementara itu supervisor pemerintah adalah cendekiawan, yang mampu melakukan penetrasi hingga sampai pada level keluarga. Cendekiawan ini dapat dikategorikan relawan, yakni kalangan terdidik yang mayoritas pulang ke kampung halaman mereka, ataupun relawan yang sengaja datang sebagai akademisi. Mereka tergerak untuk melakukan aksi sosial sekaligus pemerhati. Kelemahan pemerintah memang tidak dapat melakukan tindakan instruktif represif sebagaimana di wilayah lain, namun melalui manajemen komunikasi efektif dengan Kepala Adat, maka tindakan strategis yang dimaksud dapat dicapai.

Dibandingkan hasil penelitian tiga penelitian terdahulu, penelitian ini, "Peran Komunikasi *Hexahelix* dalam Konstruksi Sosial Mitigasi COVID-19 pada Masyarakat Badui Luar", memiliki diferensiasi, urgensi dan *novelty*. Dari sisi diferensiasi, penelitian ini membahas tentang mitigasi COVID-19 karena fokus pada masyarakat Badui luar yang memiliki karakteristik khusus dalam hal budaya, adat dan kepercayaan. Di dalamnya juga menggunakan konsep komunikasi *hexahelix* yang melibatkan enam elemen penting dalam mitigasi COVID-19, yaitu pemerintah, akademisi, tenaga media, masyarakat, relawan/pemuka keluarga dan pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana komunikasi *hexahelix* dapat membentuk konstruksi sosial mitigasi COVID-19 yang sesuai dengan konteks masyarakat Badui luar.

Penelitian ini juga memiliki urgensi yang tinggi karena mengangkat isu yang relevan dengan kondisi pandemi saat itu yang membutuhkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi dampak COVID-19. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi dan sosial dengan mengaplikasikan konsep komunikasi *hexahelix* dalam studi kasus masyarakat Badui luar yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

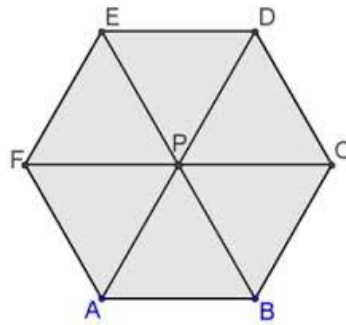
Adapun novelty penelitian, terdapat perihal penggabungan dua konsep yang berbeda, yaitu komunikasi *hexahelix* dan konstruksi sosial, dalam menganalisis fenomena mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui luar. Perihal lain adalah data yang mendalam (karena target konstruktivisme) dan kaya dari narasumber yang terlibat langsung dalam komunikasi *hexahelix*. Simpulan penelitian juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi *hexahelix* dalam mitigasi COVID-19.

Pembahasan

Masyarakat Badui Luar memiliki karakteristik khusus dalam hal budaya, adat dan kepercayaan yang berkaitan dengan mitigasi COVID-19. Mereka memiliki sistem nilai yang disebut *pikukuh* yang mengatur segala aspek kehidupan, hubungan dengan alam, sesama manusia dan Tuhan. Karakteristik ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Badui Luar dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam konteks komunikasi, aktor-aktor (komunikator-komunikator) yang terlibat, terdiri dari 6 elemen, yaitu pemerintah, akademisi (cendekiawan), relawan, tenaga medis, masyarakat, pemuka keluarga dan pemangku (kepala) adat. Pemerintah berperan sebagai pembuat dan pelaksana

kebijakan mitigasi COVID-19 yang berkoordinasi dengan para tetua adat dan tokoh masyarakat. Akademisi dan tenaga medis berperan sebagai penyedia pengetahuan dan informasi ilmiah tentang COVID-19 dan cara pencegahannya yang disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat Badui Luar. Masyarakat berperan sebagai subjek dan objek mitigasi COVID-19 yang harus mematuhi kebijakan pemerintah dan tetua adat serta berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan. Relawan berperan sebagai saluran komunikasi dan edukasi yang menyampaikan informasi tentang COVID-19 dan mitigasinya kepada masyarakat Badui Luar dengan menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami. Pemuka keluarga berperan sebagai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan mitigasi COVID-19 secara efektif dan efisien, terkoordinir dan protektif.



Gambar 7. Pola Komunikasi *Hexahelix*
(Sumber: diadaptasi oleh peneliti, 2022)

Dari Gambar 7 dapat disimpulkan sementara bahwa pola komunikasi yang terjadi, yakni antara birokrat, kepala adat, cendekiawan, relawan, tenaga medis dan simpul masyarakat berbentuk segi enam (*hexa*). Bagian A (meskipun posisi dapat saling bertukar/berputar) adalah birokrat, B kepala adat, C cendekiawan, D relawan, E tenaga kesehatan/medis dan F simpul komunitas/ publik/ masyarakat/ keluarga. Bagian tengahnya, yakni P adalah pola pengelolaan kesan dan pesan. Hal ini mengingatkan masyarakat Badui bukanlah masyarakat perkotaan yang sehari-harinya sangat dekat dengan *gadgets*, sehingga strategi komunikasi persuasif harus dipilih melalui pertimbangan komunikasi antarbudaya dan pihak manapun harus terlibat dalam pola-pola etnografis. Pada pola *hexahelix* tersebut tidak tampak adanya peran petugas keamanan yang tentunya sangat dominan di wilayah lain. Dalam penelitian ini petugas keamanan peneliti masukkan dalam kategori birokrat.

Proses komunikasi *hexahelix* dalam membentuk konstruksi sosial mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui Luar melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan strategi, implementasi tindakan, evaluasi dampak dan penyesuaian solusi. Proses ini melibatkan interaksi antara keenam aktor yang saling bertukar informasi, gagasan, saran, kritik dan dukungan. Proses ini juga melibatkan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang berubah seiring dengan perkembangan pandemi.

Hasil dari komunikasi *hexahelix* adalah terbentuknya konstruksi sosial mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui Luar yang mencerminkan kesadaran, pemahaman, sikap, perilaku dan tindakan mereka dalam menghadapi pandemi. Konstruksi sosial ini sesuai dengan konteks budaya, adat dan kepercayaan masyarakat Badui Luar. Dengan demikian, komunikasi *hexahelix* yang telah terjadi, memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat kesesuaian antara pesan dan konteks budaya masyarakat Badui Luar, tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat Badui Luar dalam mitigasi COVID-19, tingkat kepatuhan masyarakat Badui Luar terhadap kebijakan pemerintah dan tetua adat, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Badui Luar tentang COVID-19 dan cara pencegahannya dan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Badui Luar selama pandemi.

Komunikasi *hexahelix* juga memiliki dampak positif bagi masyarakat Badui Luar, seperti meningkatkan solidaritas dan kerjasama antara masyarakat Badui Luar dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat Badui Luar dalam menghadapi bencana, meningkatkan perlindungan dan pemulihan masyarakat Badui Luar dari dampak COVID-19 serta meningkatkan penghargaan dan pelestarian budaya, adat dan kepercayaan masyarakat Badui Luar.

SIMPULAN

Konstruksi sosial realitas masyarakat Badui terhadap pandemi COVID-19 dapat direpresentasikan berdasarkan sintesis manajemen komunikasi dari 4 pranata sosial yang ada dalam lingkaran sistem kemasyarakatan tradisional Badui. Pranata tersebut adalah birokrat, kepala adat, pemuka kelompok keluarga sebagai simpul komunikasi dan masyarakat itu sendiri. Kalangan Birokrat (Aparat Pemerintah Setempat) melakukan manajemen komunikasi eksternalisasi – internalisasi efektif, yakni instruksi dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan maksimal disertai koordinasi makna efektif. Selanjutnya Kepala Adat melakukan manajemen komunikasi legitimasi – sosialisasi, yakni menegaskan bahwa COVID-19 harus diatasi dengan pengobatan warisan nenek moyang dan mengikuti petunjuk pemerintah dalam berinteraksi. Berikutnya Cendekiawan (Pemerhati Budaya Badui) melakukan manajemen komunikasi institusionalisasi – objektivasi, yakni masyarakat harus taat aturan dan budaya adat serta yakin terhadap Yang Maha Kuasa. Adapun Pemuka Badui Luar melakukan manajemen komunikasi sosialisasi, yakni memberikan masukan dan peringatan kepada masyarakat setempat agar tetap menjaga kesehatan keluarga masing-masing.

Adapun nol kasus angka COVID-19 berdasarkan justifikasi simpulan dari hasil analisis dan pembahasan sangat ditentukan oleh figur sentral para Ketua Adat. Peran sentral Ketua Adat tidak saja mampu membangun konstruksi ideologis, tetapi juga konstruksi *reward* dan *punishment* terhadap adat dan budaya yang sudah terimplementasi secara turun-temurun.

Oleh karena komunikator dalam komunikasi mitigasi COVID-19 pada masyarakat Badui Luar ini melibatkan 6 elemen, maka pola komunikasi yang dimaksud dapat diterminologikan sebagai pola komunikasi *hexahelix*. Enam elemen komunikator yang dimaksud adalah: birokrat, kepala adat, cendekiawan setempat, relawan, tenaga kesehatan dan simpul-simpul masyarakat Badui sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2015). ANALISIS EPIDEMIOLOGIA PENYAKIT DEMEM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KABUPATEN LEBAK 2011 – 2013. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 2(1). <https://doi.org/10.36743/medikes.v2i1.142>
- Asy'ari, H., Syaripullah, & Prasetyo, G. P. (2013). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KANEKES(JARO PAMARENTAH) TERHADAP PENDIDIKANMASYARAKAT BADUY LUAR. *HIJRI - Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 53(9).
- Basuki, K. (2019). TAFSIR MAUDLU'I, TINJAUAN UMUM TENTANG ORANG-ORANG BADUI DAN TENTANG KARAKTER. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9).
- CMS, S., Erwina, W., & Lusiana, E. (2021). Pengetahuan lokal dan strategi lokal Sunda dalam hadapi bencana. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/inf.v1i2.34268>
- Crump, L. (2020). Conducting Field Research Effectively. *American Behavioral Scientist*, 64(2). <https://doi.org/10.1177/0002764219859624>
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Dreher, J. (2016). The Social Construction of Power: Reflections Beyond Berger/Luckmann and Bourdieu. *Cultural Sociology*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/1749975515615623>

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitri Al Qalbi, L. (2021). Kearifan Lokal Islami Suku Duri dan Implementasinya dalam Manajemen Sekolah Di Era Pandemi COVID-19. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, 3(1). <https://doi.org/10.46799/jequi.v3i1.32>
- Hendro, E. P. (2020). Pageblug: Tinjauan Aspek Antropologis untuk Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi COVID-19 di Jawa Tengah. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 4(1).
- Hidayati, S., Suansa, N. I., Samin, & Franco, F. M. (2017). Using ethnotaxonomy to assess traditional knowledge and language vitality: A case study with the Urang Kanekes (Baduy) of Banten, Indonesia. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 16(4).
- Miharja, D., Wahida, E., & Huriani, Y. (2021). MAKNA RITUAL SESAJEN DALAM AJAR PIKUKUH SUNDA (SUNDA WIWITAN) (Sudi Terhadap Penganut Ajar Pikukuh Sunda Di Padepokan Bumi Dega Sunda Academy Bandung). *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2). <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2810>
- Mulyana, & Sambas. (2021). Orang Baduy Pun Kini Sudah “ Digitalisasi.” *Antara Newspaper*, September.
- Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2021). Aplikasi Pedulilindungi Mitigasi Bencana COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i1.1321>
- Susiani, K., Ningsih, K. C. N., Suhandi, F. D., Camarini, N. P. I., & Handayani, N. P. F. H. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kehidupan Sosial Budaya dan Kearifan Lokal di Bali. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 6(2).
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>
- Wati, R. L., & Hadi, E. N. (2021). STIGMA MASYARAKAT TERHADAP PENYINTAS COVID-19 DI KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i2.2503>
- Wibisono, H. K., Trianita, L. N., & Widagdo, S. (2013). Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan. In *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*.
- Widuhung, S. M. (2021). Strategi Marketing Public Relations Petromindo Group Di era Pandemi COVID-19. *Jurnal Public Relations*, 2(1), 1–7. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jpr/article/view/308/124>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>